

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

(SKRIPSI)

**Oleh
ARIE RYAN SAPUTRA**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

ABSTRACT

Factors Analysis That Influence Changes in Capital Expenditures of Districts/Cities Government in Indonesia

by
Arie Ryan Saputra

The purpose of this study was to examine the factors that influence changes in capital expenditure of local government districts/cities in Indonesia. Sample of this research consist of 819 local government determined by purposive sampling method with year from 2013 untill 2015. After performing multiple regression with fixed effect model and using Eviews 9, the result of this research indicate that difference in regional revenue gain, sharing fund and budget estimation redundancy, and general allocation fund had significant positive effect on changes in capital expenditure.

Keyword : Difference in Regional revenue gain, sharing fund and budget estimation redundancy, Capital Expenditure, General Allocation Fund, Regional Expenditure Budget

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

**Oleh
Arie Ryan Saputra**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 819 pemerintah kabupaten/kota dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2013 hingga 2015. Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Eviews 9 dan metode *fixed effect model*, penelitian ini menghasilkan bahwa selisih capaian pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dan dana alokasi umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, APBD

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Oleh
ARIE RYAN SAPUTRA

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA EKONOMI

Pada
**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

Judul Skripsi

: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Arie Ryan Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1511031137

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

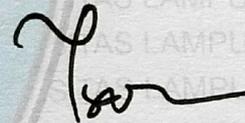
: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



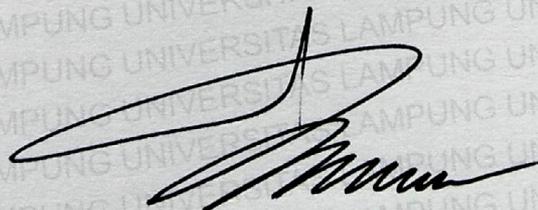
Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001



Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si
NIP 19801017 200512 2 002

MENGETAHUI

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

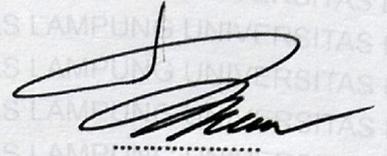


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

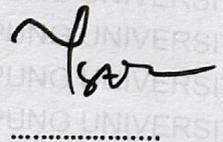
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

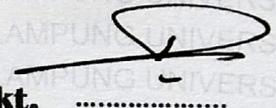
Ketua : **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris : **Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**

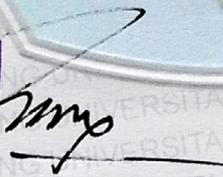


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 September 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandarlampung, Oktober 2017
Penulis,



Arie Ryan Saputra
NPM 1511031137

RIWAYAT HIDUP



Arie Ryan Saputra, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 2 Januari 1990 dari pasangan Bapak M. Thohir, A.Md.Pd., dan Ibu Misnawati, S.Pd., merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi, pada tahun 1995. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pangkalpinang dan lulus pada tahun 2001. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Pangkalpinang yang diselesaikan pada tahun 2004, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pangkalpinang hingga lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Penilai/PBB di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project (STAR)* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan *Asian Development Bank (ADB)*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota di indonesia”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.

Bandarlampung, Oktober 2017

Arie Ryan Saputra

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya lah skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I. Terima Kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II. Terima Kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Lindriana Sari, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.

5. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sulaiman, beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
6. Keluarga besar yang ada di Pangkalpinang, Palembang, dan Metro yang terus menerus memberikan dukungan sejak dari awal perkuliahan.
7. Teman-teman Rwnngginang, Jerry, Septian, dan Yusita, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
8. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch II Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung, Oktober 2017

Penulis,

Arie Ryan Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Keagenan	7
2.1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	8
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	10
2.1.5 Dana Alokasi Umum	11
2.1.6 Belanja Modal	12
2.1.7 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kerangka Pemikiran	15
2.3 Pengembangan Hipotesis	16
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	16
2.3.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	16
2.3.3 Dana Alokasi Umum	17
III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Populasi dan Sampel	18
3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya	18
3.2.1 Variabel Independen	19
3.2.1.1 Selisih Capaian Pendapatan Asli Daerah	19
3.2.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	19
3.2.1.3 Dana Alokasi Umum	20
3.2.2 Variabel Dependen	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data	20

3.4	Metode Analisis Data	21
3.4.1	Pemilihan Model Regresi	22
3.4.1.1	<i>Likelihood Ratio Test</i> (Uji Chow)	23
3.4.1.2	Uji Hausman	23
3.4.1.3	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	24
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	24
3.4.2.1	Uji Normalitas	24
3.4.2.2	Uji Multikolinearitas	25
3.4.2.3	Uji Autokorelasi	25
3.4.2.4	Uji Heteroskedastisitas	26
3.5	Pengujian Hipotesis	26
3.5.1	Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)	26
3.5.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	26
3.5.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	27
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1	Pengambilan Sampel	28
4.2	Statistik Deskriptif	29
4.2.1	Belanja Modal	30
4.2.2	Pendapatan Asli Daerah	30
4.2.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	30
4.2.4	Dana Alokasi Umum	30
4.3	Pemilihan Metode Regresi	31
4.3.1	<i>Likelihood Ratio Test</i> (Uji Chow)	31
4.3.2	Uji Hausman	32
4.3.3	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	32
4.4	Uji Asumsi Klasik	33
4.4.1	Uji Normalitas	33
4.4.2	Uji Multikolinearitas	34
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	35
4.4.4	Uji Autokorelasi	35
4.5	Analisis Hasil Regresi Data Panel	36
4.6	Pembahasan	38
4.6.1	Pengaruh Selisih Capaian PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal.....	39
4.6.2	Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal	40
4.6.3	Pengaruh DAU terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal	41
V.	SIMPULAN DAN SARAN	43
5.1	Simpulan	43
5.2	Implikasi	44
5.3	Keterbatasan Penelitian	44
5.4	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Belanja Modal Pemerintah Daerah.....	4
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel.....	30
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	30
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow.....	32
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman.....	33
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	35
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan <i>Glejser Test</i>	36
Tabel 4.7 Tabel <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi.....	37
Tabel 4.8 Tabel Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen PBM.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk adanya reformasi ialah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang semula sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antara pusat dan daerah.

Perubahan lebih lanjut mengenai sistem tata pemerintahan di Indonesia menjadi desentralisasi diatur dalam tiga paket perundangan, yaitu; UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara. Desentralisasi adalah konsep pelimpahan kewenangan yang diikuti desentralisasi fiskal baik melalui

pemberian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan sumber pendapatan asli daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penetapan APBD dengan peraturan daerah sebelum tahun pelaksanaannya dimulai membutuhkan kompromi di antara *budget actors* yang memiliki preferensi berbeda (Abdullah dan Rona, 2015). Perubahan komposisi APBD pada tahun anggaran berjalan dilakukan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD. Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 154 menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Meski memiliki dasar hukum yang jelas, perubahan APBD hanya dapat diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan komposisi belanja dalam APBD merupakan upaya logis yang dilakukan

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini dapat ditujukan untuk peningkatan investasi modal yang dapat berupa aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Kualitas pelayanan publik diharapkan akan semakin tinggi seiring meningkatnya alokasi belanja modal, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 2 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan menjadi 30 persen dari total anggaran belanja demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Mendagri saat itu, apabila ada efisiensi, baik itu dari dana perjalanan dinas maupun dalam belanja pegawai, maka dana ini bisa dialihkan untuk belanja modal. Kalau belanja pegawai dapat diturunkan, maka APBD akan semakin sehat. Memang, kecenderungan dari tahun ke tahun, belanja modal daerah sudah memperlihatkan peningkatan. Namun, peningkatan tersebut harus diekselerasi. Upaya ini dianggap lebih memberi dorongan pada sektor ekonomi, selain lebih bermanfaat bagi daerah ketimbang APBD dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai pemda (www.keuda.kemendagri.go.id).

Tabel 1.1 Tabel Belanja Modal Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran	Total Pemerintah Daerah	Belanja >30%
2012	524	108

2013	524	133
2014	539	136

Sumber: data olah dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001), ditemukan bukti empiris bahwasannya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Secara khusus dalam ayat 15 ayat 9 UU nomor 18 tahun 2016 tentang APBN tahun anggaran 2017 disebutkan bahwa penggunaan dana alokasi umum (DAU) sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur.

Perhatian yang besar pemerintah pusat terhadap besaran anggaran belanja modal yang ditetapkan pemerintah daerah, serta masih rendahnya alokasi belanja modal pemerintah daerah menjadi alasan peneliti untuk menganalisis kembali pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak dari objek penelitiannya, yaitu pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan periode tahun 2013-2015, serta pengukuran

variabel yang digunakan yang menggunakan rasio pertumbuhan sebagai dasar pengukuran variabelnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal?
2. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perubahan anggaran belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama pemahaman akan pengaruh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Alokasi Umum terhadap perubahan anggaran belanja modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suatu anggaran, khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran belanja modal pada kabupaten/kota dan menjadi motivasi dan pertimbangan dalam membuat suatu anggaran, mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah yang dimiliki, serta dapat bijak dalam menggunakan anggaran khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dipilih dan dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Masalah keagenan akan muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan merupakan teori yang berakar dari sinergi antara teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Untuk meminimalkan masalah keagenan yang muncul akibat konflik kepentingan ini maka dibuatlah kontrak antara prinsipal dan agen. Organisasi sektor publik sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan perusahaan pada umumnya dimana di dalamnya terdapat dua belah pihak yang memiliki hubungan, yaitu kontrak antara agen (pemerintah) dengan prinsipal

(rakyat).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi kontrak formal antara rakyat dan pemerintah dituangkan dalam Undang – Undang (UU) No 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Mekanisme pemilihan menunjukkan bahwa terdapat pelimpahan wewenang dari rakyat kepada kepala daerah. Proses ini menunjukkan adanya hubungan keagenan antara rakyat dan kepala daerah, kepala daerah berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam rerangka hubungan keagenan. Dalam hal ini DPRD yang dipilih oleh rakyat menjadi perwakilan rakyat, sama seperti dewan komisaris yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili mereka.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. Menurut Mardiasmo (2009), APBD dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang

program-program apa yang direncanakan pemerintah. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah sedangkan berdasarkan pasal 1 ketentuan umum UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) hasil pajak daerah (2) hasil retribusi daerah (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (4) lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed-list*) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

PAD dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dimana semakin tinggi rasio PAD dalam suatu pemerintah daerah terhadap total pendapatannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Pada saat penyusunan APBD, telah ditetapkan besaran target PAD yang hendak

dicapai pada tahun anggaran tersebut. Semakin besar realisasi PAD yang dicapai maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik semakin baik serta infrastruktur yang lebih merata dan lebih baik pula, maka hal ini juga akan kembali lagi bisa menaikkan PAD daerah tersebut.

2.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan dalam struktur APBD. SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SiLPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan (Abdullah dan Rona, 2015). SiLPA adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus

terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Dirjen Perimbangan Keuangan, DAU bersifat *block grant* yaitu penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Perhitungan DAU menggunakan pendekatan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar yaitu jumlah gaji PNS Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji PNS Daerah pada tahun sebelumnya yang meliputi gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan peraturan penggajian PNS. Celah fiskal dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal pada daerah x (celah fiskal daerah x dibagi dengan total celah fiskal nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. CF daerah juga dapat dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan

fiskal dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan fiskal yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen variabel kapasitas fiskal yang berasal dari sumber pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, belanja modal adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Dalam PP No 71 Tahun 2010 juga disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Buletin Teknis SAP Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa suatu belanja pemerintah akan dianggap sebagai belanja modal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset Pemerintah.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.

Buletin Teknis Nomor 04 tentang penyajian dan pengungkapan Belanja Pemerintah mengklasifikasikan belanja modal menjadi lima jenis yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran- pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

2. Kusnandar dan Siswantoro (2012) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal..
3. Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
4. Abdullah dan Junita (2015) meneliti tentang bukti empiris pengaruh budget ratcheting terhadap hubungan antara pendapatan sendiri dan belanja daerah pada kabupaten/kota di Aceh. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu bahwa pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah dan budget ratcheting memoderasi di antara keduanya
5. Abdullah dan Rona (2015) meneliti tentang pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal studi kasus atas perubahan anggaran kabupaten/kota tahun 2012 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel dana perimbangan yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal,

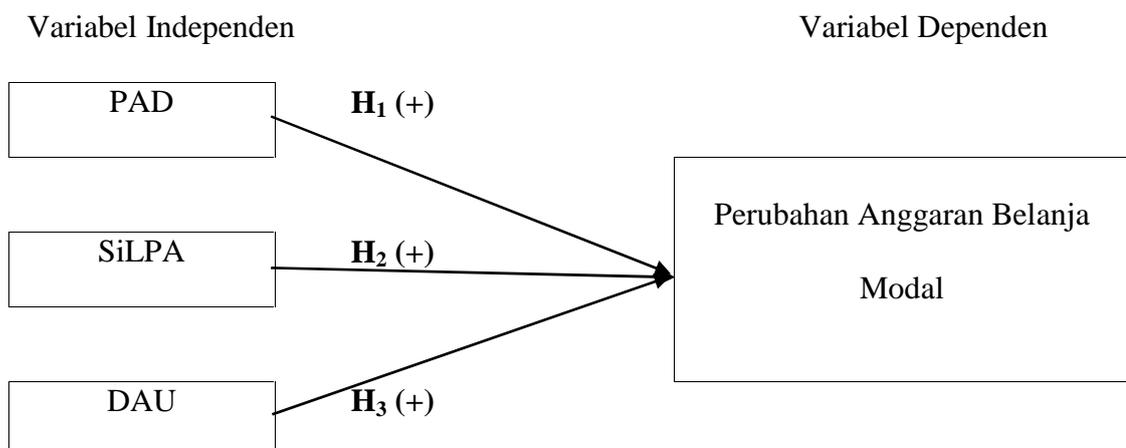
sedangkan variabel sisa anggaran dan pendapatan sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan telaah *literature* yang telah dikemukakan diatas serta dengan melihat hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal, maka penulis mengembangkan kerangka teoritis penelitian tentang pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal sebagai dasar penentuan hipotesis dalam bentuk diagram sistematik melalui bagan yang digambarkan sebagai berikut ini.

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya terhadap belanja adalah saling berkaitan secara sebab akibat, dimana penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya akan mempengaruhi proses penganggaran belanja oleh pemerintah daerah. Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdullah & Halim (2004) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan memakai *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Kusnandar dan Siswantoro (2012), dan Arwati dan Hadiati (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Selisih Capaian Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

2.3.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih

kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012), dan Maryadi (2014) menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂ : SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

2.3.3 Dana Alokasi Umum

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti yang umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten atau kota di Indonesia yang mempublikasikan APBD murni di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2015.
2. Kabupaten atau kota di Indonesia yang melaporkan anggaran dari sektor PAD, SiLPA, DAU, dan Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Jumlah PAD, SiLPA, DAU dan Belanja Modal tidak bernilai nol (0).

3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, dan satu variabel dependen. Berikut ini definisi variabel dan pengukuran dari masing-masing variabel yang digunakan:

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.2.1.1. Selisih Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Variabel ini diukur dengan menghitung selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan lalu dibagi dengan realisasi penerimaan.

$$\text{rasio selisih capaian PAD} = \frac{\text{Target PAD} - \text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

3.2.1.2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Variabel ini diukur dengan menghitung pertumbuhan nilai SiLPA tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

$$rasio SiLPA = \frac{\text{Saldo SiLPA } t - \text{Saldo SiLPA } t - 1}{\text{Saldo SiLPA } t - 1}$$

3.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. Variabel ini diukur dengan menghitung pertumbuhan nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

$$rasio DAU = \frac{\text{Saldo DAU } t - \text{Saldo DAU } t - 1}{\text{Saldo DAU } t - 1}$$

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan anggaran belanja modal. Perubahan anggaran belanja modal diukur dengan menghitung selisih antara anggaran belanja modal dalam APBD perubahan dengan anggaran belanja modal dalam APBD murni dibagi dengan anggaran belanja modal dalam APBD murni.

$$\text{Perubahan Anggaran BM} = \frac{\text{Anggaran BM Perubahan} - \text{Anggaran BM Murni}}{\text{Anggaran BM Murni}}$$

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yaitu data sekunder. Sugiyono (2012), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan

data sekunder berupa data APBD murni kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di situs web www.djpk.kemenkeu.go.id. Dari Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dapat diperoleh informasi mengenai pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dana alokasi umum (DAU), dan anggaran belanja modal daerah akhir.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear dengan model penelitian yang dinotasikan sebagai berikut:

$$PABM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_5 DAU + \varepsilon$$

Dimana:

PABM : Perubahan Anggran Belanja Modal

PAD : Selisih Capaian Pendapatan Asli Daerah

SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

DAU : Dana Alokasi Umum

: Konstanta

: Koefisien Regresi

: Error

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan aplikasi program komputer *evIEWS 9* sebagai alat regresi model yang telah dirumuskan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.4.1 Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini melibatkan kabupaten/kota sebagai *cross section* dan antar tahun menjadi *time series*. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), dalam melakukan estimasi model regresi data panel digunakan tiga teknik uji regresi, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

Dengan *common effect*/ OLS (*ordinary least square*), akan dihasilkan data nilai residual yang sekecil mungkin dengan cara menjumlahkan kuadrat residual. Semakin kecil nilai residualnya maka nilai analisis regresi yang dihasilkan akan semakin mendekati nilai aktualnya. Residual merupakan suatu peubah acak yang bersifat identik dan independen serta terdistribusi secara normal dan varians tertentu di antara sampel.

Sementara untuk *fixed effect* (model efek tetap), dasar pemikiran dari teknik ini adalah adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan, atau dengan kata lain, intersep ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Menurut Winarno (2011) pendekatan model efek tetap ini mengasumsikan bahwa slope koefisien konstan sedangkan intersepanya bisa bervariasi antar individu dan waktu. Salah satu cara untuk membedakan intersep antar individu sering dilakukan pendekatan dengan cara memasukan variabel semu (*dummy*). Sehingga model ini sering disebut *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

Sedangkan dalam model *random effect* (efek acak), penggunaan variabel boneka dapat mengurangi derajat kebebasan yang mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Dalam model efek acak, perbedaan antar parameter dimasukkan ke dalam *error*, baik antar individu maupun antar waktu. Karena itulah model efek acak ini

seringkali disebut model komponen *error*.

Winarno (2011) menyarankan bahwa untuk memilih teknik analisis yang paling baik diantara *common effect*, *Fixed Effect* dan *random effect* dalam menguji model penelitian yang telah ditentukan, perlu dilakukan beberapa pengujian antara lain Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*, sebagai berikut:

3.4.1.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan dengan membandingkan antara nilai $\text{Prob}>F$ dengan nilai α . Nilai $\text{Prob}>F$ dapat diperoleh dari olahan data evIEWS 9. Hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model menggunakan model *common effect*

H_a : Model menggunakan model *fixed effect*

Apabila $\text{Prob}>F < \alpha$ maka kita menolak H_0 dan menyimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*. Sebaliknya apabila $\text{Prob}>F > \alpha$ maka kita menerima H_0 dan menyimpulkan bahwa model *common effect* lebih baik dari pada model *fixed effect*.

3.4.1.2 Uji Hausman

Pelaksanaan uji Hausman dapat dilakukan dengan fasilitas *software* EvIEWS 9. Dari hasil uji Hausman ini nanti akan dilihat nilai *chi-square* statistik/hitung dan probabilitasnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model menggunakan model *Random Effect*

H_a : Model menggunakan model *Fixed Effect*

Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini (evIEWS 9), apabila nilai *chi-square* statistik/hitung $>$ *chi-square* tabel dan *p-value* signifikan ($P\text{-value} < \alpha$) maka kita menolak H_0 dan menyimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *fixed effect*,

sebaliknya apabila nilai *chi-square* statistik/hitung < *chisquare* tabel dan *P-value* > maka kita menerima H_0 dan menyimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *random effect*.

3.4.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima H_0 , selanjutnya dilakukan pengujian yang dinamakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model menggunakan model *Common Effect*

H_a : Model menggunakan model *Random Effect*

Hasil uji *Lagrange Multiplier* akan dilihat nilai statistik *chi-squares* hasil olahan data eviews. Apabila nilai dari uji *Lagrange Multiplier* nilainya lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares*, maka kita menolak H_0 . Dengan kata lain akan digunakan model *random effect* karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil Uji *Lagrange Multiplier* berada dibawah nilai kritis statistik *chi-square* maka akan menerima H_0 . Jika H_0 diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik menggunakan model *random effect*.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Gujarati, 2012). Uji normalitas pada aplikasi EViews 9 dapat dilakukan dengan melihat pola pada histogram yaitu nilai probabilitas pada histogram tersebut, ataupun melakukan uji Jarque-Bera.

Hasil dari uji normalitas ini dapat disimpulkan dengan melihat tampilan histogramnya, data yang terdistribusi normal akan menampilkan pola kurva normal yang berbentuk seperti lonceng terlungkup. Namun demikian akan sulit melihat hanya dari gambar histogram saja, oleh karena itu untuk memperkuat kesimpulan, dapat dilihat dari nilai uji Jarque-Bera. Nilai uji Jarque Bera (JB) yang diperoleh dari histogram *normality test* pada Eviews 9 dibandingkan dengan nilai *chi-square* tabel. Jika hasil JB hitung lebih besar dari nilai *chi-square* tabel artinya residual terstandarisasi tidak terdistribusi normal, dan sebaliknya jika JB hitung lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel artinya residual terstandarisasi terdistribusi normal.

3.4.2.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas. Jika korelasi antar variabel-variabel bebas tersebut di atas 0,80 maka dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinieritas.

3.4.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel yang diteliti. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW test). Hasil uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai d yang akan berada di kisaran 0 hingga 4. Di mana apabila d terletak di antara 0 dan d_L , maka disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif. Bila d terletak di antara d_L dan d_U maka tidak dapat diputuskan. Bila d terletak di antara d_U dan $4-d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi. Bila d terletak di antara $4-d_U$ dan $4-d_L$ maka tidak dapat

diputuskan. Bila d terletak di antara $4-d_L$ dan 4 maka terjadi autokorelasi negatif.

3.4.2.4 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*, yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menilai apakah hipotesis berpengaruh signifikan secara statistik atau tidak terhadap variabel-variabel yang diuji. Ada 3 jenis pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel (nilai t tabel). Apabila nilai statistik $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis yang menyatakan suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, dapat diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangatterbatas, sebaliknya jika nilai R^2 yang mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independent koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square* (adj R^2).

Penelitian ini menggunakan nilai adj R^2 . Nilai adj R^2 berkisar 0 sampai 1. Apabila adj R^2 mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai adj R^2 mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

3.5.3 Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah hipotesis penelitian diterima jika probability value (p-value) $< 0,05$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari selisih capaian pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Selisih capaian pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal dengan arah positif.
- b. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal dengan arah negatif.
- c. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal dengan arah negatif.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap

peningkatan pengalokasian belanja modal daerah pada kabupaten/kota di Indonesia.

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja modal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara lain diuji dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, serta Dana Alokasi Umum. Namun pengaruh ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pemerintah daerah, salah satunya ditentukan oleh prioritas penggunaan DAU dan mengalokasikan minimal 25% untuk porsi belanja modal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suatu anggaran, khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran belanja modal pada kabupaten/kota. Serta diharapkan dapat digunakan menjadi motivasi dan pertimbangan dalam membuat suatu anggaran, memaksimalkan potensi penerimaan daerah, serta dapat bijak dalam menggunakan anggaran khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat banyak pengurangan data dikarenakan data yang outlier dan data yang tidak lengkap.

2. Nilai koefisien determasi penelitian ini sebesar 7,44% yang berarti 92,56% dijelaskan sebab-sebab lain diluar model penelitian.
3. Penelitian ini hanya mendasarkan pada informasi berupa angka yang terdapat pada laporan realisasi anggaran (LRA) sehingga mengabaikan aspek diluar data tersebut, seperti prioritas belanja daerah dan kebijakan politis penyusunan anggaran daerah.

5.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya agar menambah periode pengamatan sehingga diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak sehingga dapat terlihat variasi antar tahun pengamatan.
2. Menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Junita, Afrah. 2016. *Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh*. MODUS Vol.28 (2) 2016: 185-201.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul, Halim. 2003. *Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. *Procceding Simposium Nasional Akuntansi VI ASPP-15.20*: 1140-1159.
- Abdullah, Syukriy dan Rona, Riza. 2014. *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Iqtishadia*, Vol. 7, No.1, Maret 2014: 179-202.
- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. *Semantik* 2013, 3 (1): 498-507.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. *Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3. No. 2 Juli 2010 Hal. 155-172.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. <https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/aspp-04.pdf>. Diakses pada 17 Februari 2017
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Salemba 4. Jakarta Selatan.
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Salemba 4. Jakarta Selatan.

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harianto dan Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. <https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/aspp-15.pdf>. Diakses pada 17 Februari 2017
- Jensen, M. dan W. Meckling. 1976. *Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*,3:305-360
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja Dan SiLPA Dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah*. kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Akuntabilitas%20Anggaran%20Publik.pdf. Diakses pada 18 Mei 2017
- Kusnandar dan Siswanto, Dodik, 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Legrenzi, Gabriella & Milas, Costas, 2001. *Non-linear and asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities*. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=NASM2002&paper_id=476. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Maryadi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau.
- Mayasari, L. P. R.; Sinarwati, N.K; dan Yuniarta, G.A. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Nachrowi, D dan Usman, Hardius. 2006. *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 3*. STIM YKPN. Yogyakarta.

www.djpk.depkeu.go.id

www.keuda.kemendagri.go.id diakses pada tanggal 17 Desember 2016

Yovita, farah Marta dan Utomo, Dwi Cahyo. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010)*. Universitas Dipenogoro. Jawa Tengah